

UPAYA UNIAP DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND

Desy Lucia Ariyanti Arby

Christy Damayanti

Dipokusumo

Program Study Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Upaya UNIAP dalam menangani Human Trafficking di Thailand. Perdagangan manusia di Thailand mengalami peningkatan setiap tahun, para korban dipekerjakan dengan upah rendah hingga dijadikan pekerja seks. Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah human trafficking dan kemanusiaan, melalui kerjasama Internasional, kerjasama dengan Organisasi Internasional dilakukan dengan UNIAP dan melibatkan negara – negara tetangga seperti, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi pustaka pada buku, jurnal ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori Organisasi Internasional dan Human Security. Hasil dari penelitian ini untuk mengatasi Human Trafficking di Thailand, Upaya yang dilakukan UNIAP adalah membuat kebijakan menandatangani MOU dengan negara tetangga. Prevention, melakukan kampanye meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia. Protection, melakukan penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi serta bantuan hukum. Prosecution, menerapkan peraturan mengenai Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008).

Kata Kunci: Human Trafficking, Thailand dan UNIAP.

ABSTRACT

This thesis entitled UNIAP attempt of dealing with Human Trafficking in Thailand. Human Trafficking rate in Thailand are increases over year. The victims are employed with low wage and even made a sexual worker. Thailand government has taken some attempt to deal with the human trafficking and humanity problem, one of which is to cooperate with The International Organization together with UNIAP, involve neighboring country such a Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam. The research method employed was Descriptive Qualitative Research; technique of collecting to this study. The theories used were International and Human Security theories. The result of the research used to against Human Trafficking in Thailand, UNIAP was also make an agreement with the MOU together with neighboring country. Prevention, do a campaign to raise awareness about Human Trafficking. Protection, do a rescue, identification, rehabilitation and legal assistance. Prosecution, enforce rules regarding Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008).

Keywords : Human Trafficking, Thailand, UNIAP.

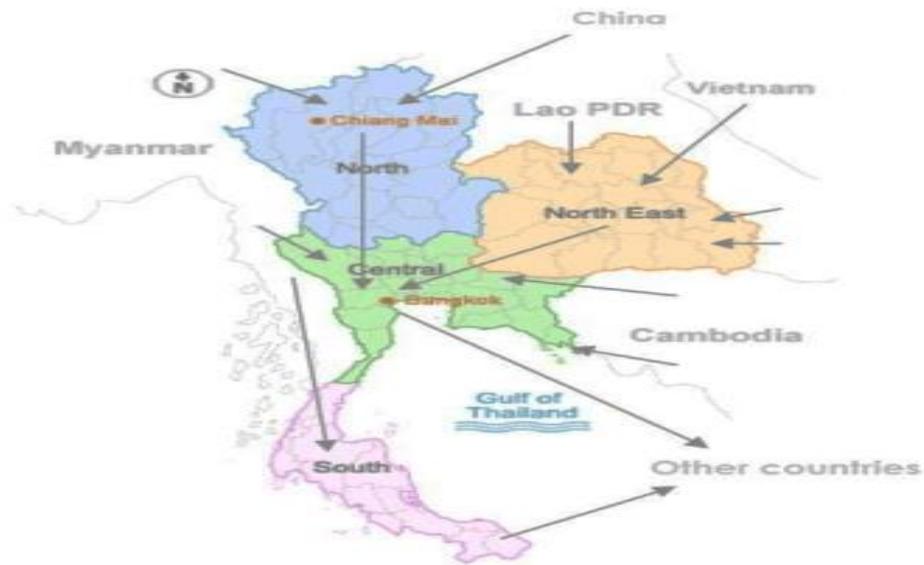
PENDAHULUAN

Human Trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Para pelaku seringkali merayu, menipu, mengancam hingga menculik para korban dalam menjalankan tindak kejahatan ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia antara lain, rendahnya pendidikan, tingkat kemiskinan yang tinggi hingga banyaknya penduduk. Perdagangan manusia merupakan ancaman bagi keamanan manusia. Bukan hanya persoalan mengenai kejahatan tetapi juga Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut berkaitan dengan hak dasar manusia yaitu hak mendapatkan kehidupan yang layak dan layak serta hak sebagai manusia yang bermartabat.

Perdagangan manusia di Thailand semakin meningkat dari tahun ke tahun, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak – anak. Thailand juga menjadi negara transit dan tujuan bagi korban perdagangan manusia yang berasal dari berbagai negara. Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga melibatkan negara – negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Thailand seperti Laos, Myanmar dan Kamboja. Selain menjadi negara transit Thailand juga menjadi penadah dari korban perdagangan manusia yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko dan Amerika

Selatan. Serta mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas.

Berikut ini adalah rute perdagangan manusia masuk dan keluar di Thailand



Karena tingginya tingkat perdagangan manusia ini, Thailand telah masuk kedalam Tier 2 Watch List. Untuk mengurangi tingkat kejahatan manusia Thailand sudah melakukan berbagai upaya, seperti pembuatan kebijakan, menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral, pembuatan MOU dan kerjasama dengan badan – badan internasional seperti ILO dan UNIAP (United Nation Inter Agency Project on Human Trafficking). UNIAP sendiri merupakan salah satu badan PBB yang berdiri pada tahun 2000. Memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas serta merespon masalah perdagangan manusia di wilayah GMS. Selain di Thailand UNIAP juga beroperasi di wilayah Kamboja, Tiongkok, Laos, Myanmar dan Vietnam. (Sulih Dian : 2013 : 4) Untuk itu pemerintah dan UNIAP berusaha untuk mengurangi tingkat kejahatan perdagangan manusia dengan kegiatan rehabilitasi, identifikasi, bantuan hokum, bantuan kesehatan dan reintegrasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membuat rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Upaya UNIAP dalam Menangani Human Trafficking di Thailand?

Peneliti menggunakan teori Organisasi Internasional dan Human Security untuk menganalisa masalah tersebut. Pemerintah Thailand melakukan kerjasama dengan UNIAP karena perdagangan manusia

di Thailand tidak hanya melibatkan negaranya tetapi melibatkan negara lain terutama negara yang berbatasan langsung dengan Thailand sehingga untuk menangani masalah perdagangan manusia Thailand membutuhkan bantuan dari UNIAP, karena UNIAP memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas dan merespon masalah perdagangan manusia

Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori Human Security. UNDP mendefinisikan keamanan manusia mencakup *freedom from fear* dan *freedom from want*. Dan human security memiliki tujuan untuk melindungi inti vital dari seluruh kehidupan manusia dengan cara mendorong dan pemenuhan kebutuhan manusia. Para traffickers menjerat korban umumnya menggunakan tipuan, kekerasan dan mengintimidasi para korban.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yang bersifat penggambaran apa adanya dengan proses pemecahan masalah yang sistematis dengan menggambarkan suatu penelitian sesuai dengan kenyataan tanpa adanya subjektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki fakta, kondisi dan keadaan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian dengan apa adanya (Arikunto, Suharsimi, 2010:35). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana upaya UNIAP Dalam menangani *Human Trafficking* di Thailand”. Penelitian ini dibatasi pada penanganan Human Trafficking oleh UNIAP phase III dari tahun 2007 - 2013. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan kejahatan Human Trafficking. Dan untuk pengumpulan data dari internet penulis menggunakan website berita resmi seperti kompas.com, CNN, serta website resmi dari UN ACT, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking di Thailand

Perdagangan manusia saat ini menjadi isu yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena kejahatan lintas negara ini bukan hanya mengenai suatu negara tapi juga menjadi melibatkan negara lain. Sebagian besar korban yang diidentifikasi di Thailand adalah migran yang telah dipaksa, ditipu, menjadi pekerja paksa atau dieksploitasi secara seksual. Selain prostitusi korban juga diperdagangkan sebagai

buruh dengan upah yang rendah, kebanyakan korban berasal dari negara yang berbatasan dengan Thailand.

Sebagian besar korban perdagangan manusia yang ada di Thailand berasal dari Myanmar, Kamboja, dan Laos. Para migran yang berasal dari Myanmar memasuki Thailand melalui Provinsi Ranong di pos pemeriksaan Mae Sot di Provinsi Tak, melalui distrik Sangkhlaburi di Provinsi Kanchanaburi, Mae Hong Son, dan Chiang Mai. Kemudian migran dari Laos memasuki Thailand melalui distrik Phiboonmangsa harndi Provinsi Ubon Ratchathani, Mukdahan dan Provinsi Nong Khai. Dan migran dari Kamboja memasuki Thailand melalui Aranyaprathet di Provinsi Srakaew, Provinsi Surun dan Tat. (SIREN : 2010, diakses pada 1 juni 2020 Pukul 23.50) Penelitian dari UNIAP menyebutkan 23% dari migran gelap Kamboja merupakan korban eksploitasi yang dideportasi dari Thailand. Sekitar 9,3% korban yang dideportasi merupakan korban perdagangan manusia. (UNODC :2017: 152)

Gambar 2 merupakan jumlah Korban Perdagangan Manusia di Thailand

Jumlah Perdagangan Manusia di Thailand				
Tahun	2000	2002	2004	2006
Jumlah	2048	2452	2670	2770

Keterangan : Data diatas merupakan jumlah korban perdagangan manusia di Thailand dari tahun 2000 hingga 2006. Sumber: *jurnal Irmalia Agustina mengenai “Ketidak efektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP”*.

Dari table diatas menunjukkan peningkatan jumlah perdagangan manusia dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Sehingga pemerintah perlu memberikan penanganan khusus untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Karena banyaknya korban perdagangan manusia yang meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah Thailand mebuat berbagai kebijakan dan upaya – upaya untuk menangani masalah perdagangan manusia dengan membuat Undang- Undang Anti Perdagangan Manusia di Thailand tahun 1997, kemudian pada tahun 2008 pemerintah Thailand membuat penetapan *Prevention and Suppression in Persons Act* atau *The Anti- Trafficking in Persons Act*, yang merupakan perbaikan dari *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act* yang dianggap kurang menyeluruh karena ditujukan hanya untuk perempuan dan

anak-anak dan dianggap belum mengakomodir keselamatan laki-laki yang umumnya diperdagangkan di industri perikanan.

Pemerintah Thailand juga mengadakan kerjasama baik bilateral, multilateral, regional maupun internasional, serta keterlibatan media dan non-governmental organization (NGO). Pemerintah Thailand juga mengadakan kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara tetangga seperti Laos, Kamboja serta Myanmar. MoU tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengontrol arus migrasi dengan meningkatkan kelayakan prosedur migrasi untuk pekerja migran, pencegahan penyusupan batas illegal, perdagangan kerja illegal, dan pekerjaan illegal. Menurut laporan yang dibuat SIREN tahun 2008, ada beberapa sektor pekerjaan utama bagi para imigran yang diperdagangkan di Thailand antara lain, pertanian, eksploitasi seksual, pekerjaan rumah tangga dan perikanan, (SIREN : 2008, diakses pada 4 juni 2020 pukul 19.00)

Ancaman Human Trafficking bagi Human Security

Di era globalisasi saat ini perdagangan manusia masih terjadi di Thailand. Dalam kasus perdagangan manusia para korban dijadikan sebagai komoditas ekonomi yaitu dengan dieksploitasi secara fisik maupun psikologis. Tindak kejahatan tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM. Karena memperlakukan manusia seperti memperjual belikan manusia layaknya benda mati dengan tujuan untuk dieksploitasi. Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang tidak langsung terlihat dampaknya terhadap keamanan negara, tapi hal tersebut memberi pengaruh yang negative bagi suatu negara dan dapat menurunkan citra negara dihadapan negara lain. Dan masyarakat miskin kerap menjadi sasaran para pelaku untuk dijadikan korban. Oleh sebab itu perlu andil besar negara selaku sebagai sebuah system hokum yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negaranya.

Latar Belakang UNIAP

UNIAP dibentuk pada tahun 2000. UNIAP sendiri memiliki 3 fase yang berlangsung dari tahun 2000 – 2013. UNIAP memiliki kantor manajemen regional yang berada di Bangkok, selain di Thailand UNIAP juga memiliki wilayah operasi di Myanmar, Kamboja, China, Laos dan Vietnam. UNIAP memiliki fungsi inti, yaitu mengkoordinasi serta merespon kebijakan dan operasional terhadap perdagangan manusia. Dan UNIAP juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah pusat dan daerah, organisasi local maupun internasional. Dan salah satu badan PBB yang menangani kasus perdagangan manusia di Thailand ini bekerja pada beberapa area yaitu,

Building the Knowledge Base on Human Trafficking, Supporting Action on High Priority Areas, Targeted Interventions that Respond to Identified Gaps, dan Strengthening advocacy on the Issue of Human Trafficking.

UNIAP melakukan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik pada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan mengenai factor penyebab perdagangan manusia melalui temuan mengenai kerentanan diluar kemiskinan dan kurangnya pendidikan dengan tujuan untuk membantu pencegahan perdagangan manusia yang lebih strategis dan aman, dan hal ini dicapai melalui SIREN.

UNIAP menerapkan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia diseluruh pelaksanaan kegiatannya yaitu, normative berdasarkan standar HAM internasional dan secara operasional diarahkan untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia. UNIAP juga membahas 4p anti perdagangan manusia, yaitu policy, protection, prevention serta prosecution. UNIAP memiliki 3 fase, yaitu :

1. UNIAP fase I (2000-2003), berkonsentrasi pada mempromosikan analisis kritis, membangun hubungan antar lembaga dan mendukung inisiatif percontohan skala kecil untuk mengatasi masalah yang muncul. Anggaran yang di sediakan pada fase I sebesar \$2,9 juta dan di gunakan untuk menjalankan seluruh operasional, dan disediakan oleh yayasan PBB dan kontribusi dari AusAID.
2. UNIAP fase II (2004-2006), selama fase ini UNIAP berfokus pada memfasilitasi pengembangan nota kesepahaman antara enam negara anggota GMS (Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam). Proses COMMIT menyediakan kerangka kerja multi-sektoral untuk pekerjaan penanggulangan perdagangan di tingkat regional. Dimana UNIAP ditugaskan sebagai secretariat.
3. UNIAP fase III (2007-2013), focus pada fase ini adalah peningkatan bantuan teknis untuk penanggulangan perdagangan manusia dan membuat dampak nyata dan berkelanjutan untuk perdagangan manusia. Serta penggabungan pengembangan kebijakan dengan tindakan yang kontra dengan perdagangan manusia. (UNIAP : 2014)

UNIAP Fase III

Tujuan dari UNIAP fase 3 adalah membuat dampak yang nyata dan berkelanjutan pada penanganan perdagangan manusia di wilayah GMS. Modus operandi UNIAP fase III (2007-2013)

adalah berorientasi pada layanan dan respon terhadap kesenjangan, kebutuhan, dan pengembangan teridentifikasi dalam perdagangan manusia. Tujuan dari UNIAP fase III berorientasi pada empat tujuan, yaitu :

1. Layanan kepada pemerintah, untuk mendukung pemerintah dalam pendekatan multi sectoral yang efektif untuk memerangi perdagangan manusia, terutama melalui dukungan terhadap proses COMMIT.
2. Layanan untuk mitra PBB, untuk memaksimalkan kontribusi PBB terhadap keseluruhan respon penanggulangan perdagangan, termasuk proses COMMIT.
3. Layanan untuk sektor anti perdagangan, untuk memfasilitasi alokasi dan penargetan yang optimal sumber daya anti perdagangan manusia. Terutama melalui pengumpulan dan analisis data dan informasi.
4. Proyek khusus, untuk memainkan peran dalam respon anti perdagangan manusia dengan mengidentifikasi dan mendukung proyek-proyek khusus untuk mengatasi masalah dan peluang baru yang muncul.

Focus utama UNIAP pada tahap 3 ini adalah untuk membantu pemerintahan RUPS untuk mengembangkan mekanisme dan membuat respon yang lebih efektif pada perdagangan manusia seperti, pelaksanaan rencana nasional dan pembentukan badan-badan koordinasi yang lebih relevan untuk menjalankan kerjasama regional dengan lebih efektif. Termasuk memberikan dukungan untuk pelaksanaan Sub-Regional Plans of Actions (SPA) dan National Plans of Action (NPA).

Sebagai Organisasi Internasional, UNIAP memiliki peranan untuk menjalin kerjasama hal ini diwujudkan melalui salah satu program UNIAP yaitu pembentukan COMMIT yang memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama lintas batas dan aksi anti perdagangan manusia. Dan UNIAP juga menjadi sarana perundingan, di bawah inisiatif COMMIT Thailand menandatangani MOU dengan negara tetangga.

UNIAP juga memiliki peranan sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan social kemanusiaan melalui : UNIAP bersama organisasi lainya dan stage holder Thailand memiliki focus untuk memasukan lebih banyak anak – anak kesekolah yang layak dan baik serta ikut membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun, memiliki kebijakan social dan advokasi, serta program pencegahan HIV/ AIDS.

COMMIT di Thailand

COMMIT sendiri merupakan aliansi enam pemerintah (Cina, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar dan Vietnam) yang berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan aksi anti perdagangan manusia. COMMIT bertujuan untuk mengembangkan kerjasama diantara enam pemerintahan GMS, untuk memerangi perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual. Dibawah inisiatif COMMIT ada sebuah focus untuk melibatkan sektor pariwisata untuk penanganan perdagangan manusia. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pada tahun 2007 Thailand menjadi tuan rumah untuk seminar regional mengenai “Protecting Children from Trafficking and Sexual Exploitation Tourism”. Dan diakhir seminar, Letter of Intent di adopsi oleh peserta untuk memperkuat kerjasama diantara enam negara. Dengan melakukan beberapa tindakan, sebagai berikut : pendataan bagi pelaku seks anak, membuat kampanye aman anak oleh maskapai penerbangan regional serta menyiapkan hotline sensitive anak.

Kemudian Thailand juga menandatangani MOU dengan negara – negara tetangga seperti, Thailand dan Vietnam telah membuat rencana meliputi pembentukan kelompok kerja, studi situasi, kerjasama dalam perlindungan dan pemulangan para korban perdagangan manusia dan kerjasama dalam penyelidikan dan penangkapan para pelaku.

Pada maret 2009, Kamboja dan Thailand melakukan kerjasama bilateral untuk melawan perdagangan manusia kerjasama tersebut memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi anantara pemangku kepentingan antar provinsi mengenai peran dan pencapaian mereka dalam menangani perdagangan manusia lintas batas serta membantu pengidentifikasian daerah yang membutuhkan kerjasama lebih besar.

Thailand dan Laos melakukan kerjasama dalam mengidentifikasi dan pemulangan korban perdagangan manusia. Dan kegiatan pelatihan bersama untuk staf radio dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi program radio dan tanda-tanda pada masalah perdagangan manusia. Dan proyek lainnya adalah Cross Border Collaboration on Tracing Missing Trafficked Victims in Thailand (THALACC) dilakukan untuk menciptakan mekanisme bilateral untuk koordinasi, identifikasi serta melacak orang hilang. Dalam melaksanakan kegiatannya melibatkan kedua negara dan organisasi internasional, dan 30 orang telah ditemukan dan diberikan bantuan kesejahteraan.

Thailand dan Myanmar pada tahun 2009 mulai melakukan peningkatan dalam penegakan hukum dengan mengadakan pertemuan antara Departemen Kesejahteraan Sosial Myanmar dan Departemen Pembangunan Sosial Thailand. Dan telah menyepakati target perlindungan bagi

korban perdagangan manusia. Dan sekretariat COMMIT membantu kedua pemerintahan untuk menciptakan system untuk mendapatkan dan berbagi informasi antar lembaga penegak hukum. Sebagai secretariat untuk proses COMMIT, UNIAP memberikan bantuan teknis dan keuangan. Proyek ini juga memndukung pemantauan dan implementasi program dibawah COMMIT SPA, bekerja sama dengan mitra PBB dan masyarakat sipil untuk menyelaraskan sumber daya teknis dan keuangan tambahan. (Manida Naebklang: 21)

Strategic Information Response Network (SIREN)

Jaringan respon strategis (SIREN) dibentuk pada 2007, dirancang untuk memnberikan data yang akurat, responsive, terbaru dan analisis mengenai isu-isu perdagangan manusia terutama dalam RUPS. Penelitian dan analisis data di buat berdasarkan data yang ada di lapangan yang dilakukan oleh staf UNIAP atau mitra UNIAP. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai isu perdagangan manusia dari tingkat nasional hingga regional.

Etika dan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan perdagangan Manusia

UNIAP meluncurkan panduan Etika dan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia dan paket pelatihan yang terkait dalam Bahasa Inggris serta enam Bahasa Mekong. Hal ini di lakukan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk meningkatkan standar etika para responden anti perdagangan manusia dalam RUPS. Sejak saat itu pelatihan juga diberikan pada polisi, jurnalis, penyedia layanan korban, peneliti, untuk membantu mengintegrasikan praktik etika ke dalam penelitian dan pemograman perdagangan manusia. Lebih dari 15.000 telah di sebar luaskan dalam tujuh Bahasa,

Aksi Anti –Perdagangan Manusia di Thailand

UNIAP telah melaksanakan agenda di Thailand untuk mengurangi serta merespon masalah perdagangan manusia. Salah satu yang dilakukan oleh UNIAP adalah membuat kebijakan dan koordinasi dengan Thailand berupa :

1. *Policy (kebijakan)*, Thailand telah memperkuat kerjasama regional dengan terlibat aktif dalam kegiatan COMMIT. Dan menandatangani MoU bilateral tentang perdagangan manusia dengan Kamboja, Laos dan Vietnam. Thailand juga menetapkan kebijakan mengenai pendataan migran dan menandatangani MoU bilateral dengan Kamboja, Laos dan Myanmar. Dan membuat kebijakan The National Strategic and Measures to Prevent and Suppress Trafficking in Persons (2011-2016) sebagai lanjutan dari The Thai National Policy and Plan on Prevention and Resolution of Domestic and Cross-Border Trafficking

in Children and Women (2005-2010). Serta National Policy and Pland to Eliminate the Worst Forms of Child Labour (2009-2015)

2. *Prevention (pencegahan)*, UNIAP melakukan kegiatan di sumber dan tujuan lokasi termasuk melakukan kampanye meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia, migrasi yang aman, pendidikan dan pelatihan kejujuran. Thailand juga melakukan perjanjian bilateral antara Pemerintah Thailand dengan Kamboja dan Myanmar mengenai kerjasama dalam ketenagakerjaan pekerja (2003) serta kerjasama dengan Laos mengenai kerjasama buruh (2002).
3. *Protection (pelindungan)*, UNIAP melakukan kegiatan di sumber dan tujuan daerah termasuk penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi, memberi bantuan hukum dan reintegrasi. Dalam penggrebekan dan penyelamatan awal, orang-orang akan disaring yang menunjukkan tanda-tanda pelecehan fisik, penyiksaan, trauma serta mereka yang memberikan respon positif ketika ditanya apakah mereka ditipu, dibohongi atau dibujuk saat dating untuk bekerja. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (MSDHS) juga berperan dalam pengidentifikasian korban.

Mereka yang sudah teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia akan ditempatkan di penampungan dimana kesehatan fisik dan mental akan di pantau. Mereka juga diberi penawaran medis, hukum, psikososial, rekreasi, pendidikan serta pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru.

SOP telah dikembangkan untuk pengembalian dan reintegrasi korban dari Laos, antara badan Pemerintah Thailand dan Laos serta lembaga Pemerintah Thailand dan Kamboja untuk korban yang berasal dari kamboja. Pada tahun 2009 sebanyak 513 orang telah di pulangkan dari tempat penampungan

4. *Prosecution (penuntutan)*, kepolisian Kerajaan Thailand mendirikan Divisi anak-anak, Remaja dan Wanita (CWD) kemudian berubah menjadi Divisi Anti Perdagangan manusia (AHTD) berfokus untuk menangani perdagangan manusia termasuk laki-laki. Kantor Kejaksaan Agung juga memiliki Centre Against International Human Trafficking (CAHT) yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus perdagangan manusia. Pemerintah Thailand diharuskan memperkuat dengan menerapkan peraturan baru mengenai Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) yang mulai berlaku pada 5 juni. Hal tersebut

belaku untuk semua orang atas dasar adanya kesetaraan, bukan hanya perempuan dan anak-anak. Elemen utama dari Undang-Undang ini dari perbudakan.

1. Hukuman yang berat bagi pelaku perdagangan manusia
2. Korban dapat mengklaim kompensasi dari pelaku untuk setiap kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan manusia
3. Korban akan diberikan tempat berlindung dan keperluan lainnya termasuk bantuan psiko-sosial, hukum, dan perawatan kesehatan

Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa dana yang digunakan untuk mendukung pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan bagi para korban menggunakan anggaran tahunan dari pemerintah dan menyita asset para pelaku perdagangan manusia serta bantuan asing. (SIREN: 2010, diakses pada 5 juni 2020 pukul 13.50)

PENUTUP

Kerjasama antara UNIAP dan Thailand dilakukan karena kejahatan perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada Thailand tetapi juga melibatkan negara – negara tetangga sehingga masalah tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Thailand. Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia tersebut dibentuklah COMMIT pada tahun 2004 yang memiliki fungsi untuk menciptakan kerjasama lintas batas yang berkelanjutan dan aksi anti perdagangan manusia.

Kemudian dibawah inisiatif COMMIT Thailand melakukan penandatanganan MOU dengan negara dan tugas utamanya adalah pemulangan yang aman bagi para korban. Dan pembentukan SIREN pada tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan data terbaru mengenai perdagangan manusia. UNIAP bersama dengan Thailand membuat kebijakan policy, prevention, protection dan prosecution.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irmalia Agustina. 2016. “Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP”. Vol. 5. No.2. Hal 507-517. Journal Unair.
- Naebklang, Manida. 2011. “Global Monitoring: status of action against commercial sexual exploitation of children”. Bangkok: ECPAT International.
- Ruhiyat, Erwin. 2012. “*Pengantar Kajian Human Security*.” Jakarta.

Sulih Dian Permata Andi. 2013. *“Faktor Kultural dan Ekonomi Sebagai Penyebab Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Periode 2006-2011.”* Universitas Airlangga.

UNODC. 2017. “Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand”. Bangkok.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand176.pdf&ved=2ahUKEwir_ZT6kbfrAhVHdCsKHbWKAryQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2ZfJA1Y4HFluW_y5Abjdoy, diakses pada 4 juni 2020 pukul 19.00)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.brandeis.edu/investigate/slavery/docs/thailand-uniap-datasheet-2010.pdf&ved=2ahUKEwiowIyJk7frAhWEbisKHdQIBIMQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2bj7LPGyQcQLyoEpioeanz>, diakses pada 5 juni 2020 pukul 13.50